

INDONESIA DI TENGAH KEBANGKITAN CHINA, JEPANG, DAN INDIA

Penyunting:

Poltak Partogi Nainggolan



Balai Pustaka

JAKARTA, 2016

INDONESIA DI TENGAH KEBANGKITAN CHINA, JEPANG, DAN INDIA

Penyunting Ahli: Poltak Partogi Nainggolan
Penyunting: Tim Balai Pustaka
Penata Letak: Tim Balai Pustaka
Perancang Sampul: Aly Ibnu Husein

Cetakan Kesatu, 2016

@Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Diterbitkan oleh
Penerbitan dan Percetakan
PT Balai Pustaka (Persero)

Jalan Bunga No. 8-8A
Matraman, Jakarta Timur 13140
Tel. (021) 8583369. Faks. (021) 29622129
Website: <http://www.balaipustaka.co.id>

....
p Poltak Partogi Nainggolan
i Indonesia di Tengah-Tengah Kebangkitan China, Jepang, dan India/
Poltak Partogi Nainggolan. – cet. ke- 1 – Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
xx, 202 hlm.; 14,8 × 21 cm. – (Seri BP No. ...)
1. Indonesia di Tengah-Tengah Kebangkitan China, Jepang, dan India
I. Poltak Partogi Nainggolan
EAN 978-602-260-...

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Buku ini adalah sebuah Bunga Rampai yang disusun di saat rivalitas antara China, Jepang, dan India tengah menguat di tingkat global dan kawasan, dibayang-bayangi oleh peran yang gamang dari negara adidaya AS. Buku ini menganalisis realitas perkembangan politik, ekonomi, dan keamanan setelah berakhirnya Perang Dingin di beberapa mandala dunia, seperti Asia Tenggara dan Asia Timur, dan secara lebih spesifik di Laut China Selatan, Laut China Timur, dan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berbagai perspektif yang digunakan diharapkan dapat menghadirkan pembaca dengan informasi dan pemahaman yang lebih lengkap dan komprehensif. Demikian pula, dengan data terkini dan detail yang disajikannya.

Buku ini disusun dari hasil riset bersama para penulisnya dalam sebuah riset kepustakaan dan lapangan kelompok, yang dipimpin penyunting. Untuk dapat memberikan pengantar dan penjelasan yang baik ke arah pembahasan yang mendalam, penyunting telah memberikan kontribusi tulisannya, baik di bagian Prolog maupun Epilog buku ini. Hasil penelitian dan tulisan yang lebih mendalam diberikan oleh masing-masing penulis buku ini, sebagai bagian dari tim riset dalam rentang waktu sejak awal hingga akhir tahun 2016. Sudah tentu, penyunting dan masing-masing penulis buku ini menyadari keterbatasan informasi dan analisis yang mereka miliki dan lakukan, karena keterbatasan kesempatan yang mereka miliki dan kesulitan realistik yang mereka hadapi. Namun, seperti sebelumnya, biarlah semuanya ini kembali menjadi tanggung jawab profesional penyunting dan semua penulis atau kontributor buku ini.

Misi utama buku ini sendiri adalah menyediakan informasi dan penjelasan yang komprehensif mengenai perkembangan realistik di tingkat global dan kawasan. Penyunting dan para penulis buku ini mengharapkan para pembacanya, tidak hanya khalayak secara umum, namun juga para intelektual pengambil keputusan dan pembuat kebijakan di tingkat nasional, dapat memahami betapa pentingnya perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan cepat berubah. Mereka juga diharapkan dapat lekas memahami implikasi kritis berbagai perkembangan dan perubahan itu terhadap nasib negara dan bangsa di masa depan, dalam jangka pendek dan panjang.

Patut diakui, semula perhatian serius hanya diberikan pada eksistensi, pertumbuhan kinerja, dan rivalitas China dan Jepang. Tetapi kemudian, para periset dan sekaligus penulis buku ini menyadari India tidak dapat disepelekan, dan bahkan, diabaikan begitu saja kehadiran dan perkembangannya dewasa ini dan di masa depan, di tingkat global dan di berbagai kawasan. Sebagai konsekuensinya, riset dan analisis kemudian memasukkan faktor India sekaligus dalam satu bahasan yang tidak terpisahkan. Di parlemen, China sendiri dapat dikatakan sebagai negara dengan kepentingan yang tinggi dan begitu agresif dalam berbagai aktivitasnya berupaya memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik di sana, sebagaimana halnya yang telah diperlihatkan para aktor kebijakan negara tersebut di tingkat pemerintahan. Jepang tampak mulai ikut aktif dalam perkembangannya kemudian, agar tidak ketinggalan dari China. Sedangkan India bergerak belakangan dan tampak perlahan mengikuti kemampuan kondisi domestik untuk menopangnya dan kepentingan internasional yang harus dikejanya. Indonesia jauh lebih lamban lagi bergerak, karena ia masih gamang menempatkan diri agar dapat memainkan posisinya secara tepat.

Fokus bahasan dan tingkat kedalaman diskusi dan analisis memang berbeda dalam satu tulisan dengan tulisan lainnya. Karena, perisetnya diketahui, memiliki ketertarikan dan kepentingan pada obyek riset yang berbeda. Demikian halnya, tingkat keberagaman sumber data yang digunakan bisa juga berbeda. Namun, pada dasarnya, metodologi dan (sumber) data standar yang dipakai adalah sama. Memang diakui, di sisi lain, ada informan yang tidak terwawancarai. Ini disebabkan persoalan ketersediaan waktu wawancara yang tidak tepat atau bertabrakan.

Isu kebangkitan Indonesia sebagai pendaatang baru dalam kalangan pemain utama di tingkat global dan kawasan juga masih kontroversial, atau secara terus terang, ada yang meragukannya. Namun, terlepas dari kondisi ekonominya yang masih rentan gejolak akibat pengaruh perkembangan dalam dan luar negeri, Indonesia, seperti halnya India, tidak bisa disepelekan, apalagi diabaikan sama sekali, kehadiran dan perannya. Faktor-faktor geografis, seperti letaknya yang sangat strategis di posisi silang, di antara dua benua (di antara Benua Asia dan Australia) dan dua Samudra (Samudra Pasifik dan Hindia), luas wilayah, kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), serta faktor-faktor demokrafis, seperti jumlah penduduk (sebagai keempat terbanyak di dunia setelah China, India, dan AS), tingkat keberagaman dan toleransinya yang tinggi, telah membuat Indonesia dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonominya yang masih dinamis dan relatif tinggi (di atas 5 persen setiap tahun), sebagai negara yang harus diperhitungkan akan hadir sebagai kekuatan (besar) baru dalam dinamika tatanan rivalitas *major powers* yang ada dewasa ini. Masalahnya, tinggal bagaimana Pemerintah Indonesia dapat memimpin, mengelola, dan mengendalikan negeri ini dalam realitas dinamika yang berlangsung, sehingga

ia tidak menjadi mandala perebutan kepentingan *major powers*, tetapi dapat menunjukkan eksistensi dan memainkan perannya sebagai faktor atau negara yang memang harus benar-benar diperhitungkan.

Jakarta, September 2016
Penyunting,

Poltak Partogi Nainggolan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PROLOG	xi
<i>Bagian Kesatu</i>	
RIVALITAS CHINA, JEPANG, DAN INDIA DI KAWASAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPENTINGAN INDONESIA	
<i>Oleh: Poltak Partogi Nainggolan</i>	
BAB 1 PENDAHULUAN	3
I. Latar Belakang.....	3
II. Permasalahan	6
III. Kerangka Pemikiran.....	9
IV. Metodologi	14
BAB 2 RIVALITAS CHINA DAN JEPANG DI KAWASAN.....	17
I. Perkembangan Ekonomi Kekuatan Baru Asia	17
II. Eksistensi China dan Jepang di Asia Tenggara.....	22
III. Rivalitas China dan Jepang di Laut China Timur	30
BAB 3 RIVALITAS CHINA DAN INDIA.....	43
I. Rivalitas China dan India di Tingkat Global	43
II. Rivalitas China dan India di Samudra Hindia.....	57
BAB 4 INDONESIA DAN RIVALITAS MAJOR POWERS DI KAWASAN.....	65
I. Paradigma dan Doktrin Politik Luar Negeri Indonesia yang Belum Berubah	65
II. Inferioritas Indonesia dalam Menghadapi China ...	71
III. Kasus Kereta Api Cepat (KAC) Jakarta-Bandung....	80
IV. Kasus Proyek Migas Blok Masela.....	87

BAB 5 MENINGKATNYA EKSPANSI CHINA DAN MEROSOTNYA KINERJA JEPANG	93
I. Investasi di Bibir Pasifik.....	93
II. Kesenjangan antara Rencana dan Realisasi	102
III. Rivalitas China dan Jepang di Berbagai Daerah dan Sektor	110
IV. Rivalitas China dan Jepang di Sektor Kreatif.....	117
BAB 6 BERLANJUTNYA DIPLOMASI KAPAL MERIAM CHINA.	123
I. Kasus Pelanggaran Kapal Kway Fey 10078.....	123
II. Perspektif Hukum Pelanggaran China.....	127
III. Dampak Internasional Arogansi China	131
BAB 7 MASIH RENDAHNYA INTENSITAS HUBUNGAN INDONESIA-INDIA.....	135
I. Menilai Potensi India Sebagai Sahabat Lama Indonesia	135
II. Perlunya Kreatifitas dalam Pengembangan Kerjasama.....	138
III. Yang Kontraproduktif Untuk Pengembangan Hubungan Bilateral.....	143
BAB 8 PENILAIAN KEMBALI DOKTRIN POLITIK LUAR NEGERI DAN RESPONS INDONESIA	145
Bab 9 PENUTUP	161
BIBLIOGRAFI	165

Bagian Kedua

KEBIJAKAN KEAMANAN BARU JEPANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN KAWASAN

Oleh: Simela Victor Muhamad

BAB 1 PENDAHULUAN	185
I. Latar Belakang	185
II. Permasalahan	188
III. Kerangka Pemikiran.....	188

BAB 2 DINAMIKA KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG	194
I. Masa Perang Dingin.....	194
II. Pasca-Perang Dingin	200
BAB 3 KEBIJAKAN KEAMANAN BARU JEPANG	212
I. Reinterpretasi Pasal 9	212
II. Upaya Merespons Dinamika Keamanan Kawasan.	218
A. Respons Terhadap China	219
B. Respons Terhadap Korea Utara.....	223
BAB 4 IMPLIKASI TERHADAP KEAMANAN KAWASAN	227
BAB 5 KESIMPULAN.....	239
BIBLIOGRAFI	243

Bagian Ketiga

TANTANGAN Kerjasama INDONESIA DAN JEPANG DALAM DIPLOMASI EKONOMI

Oleh: Sita Hidriyah

BAB 1 PENDAHULUAN	255
I. Latar Belakang.....	255
II. Perumusan Masalah	259
III. Tujuan Penelitian	261
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN.....	263
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	269
I. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	269
II. Cara Pengumpulan Data.....	270
A. Studi Kepustakaan dan Dokumen	270
B. Wawancara.....	270
III. Metode Analisis Data	270
BAB 4 RISET DAN ANALISIS.....	273
BAB 5 PERAN JEPANG DALAM MENINGKATKAN INVESTASI.	275

BAB 6 MANFAAT KERJASAMA DIPLOMASI EKONOMI.....	279
I. Pengembangan Industri.....	279
II. Penyediaan Lapangan Pekerjaan.....	280
III. Pembangunan Daerah Tertinggal.....	280
IV. Alih Teknologi.....	281
BAB 7 TANTANGAN KERJASAMA DIPLOMASI EKONOMI	286
I. Beragam Peluang pada Banyak Komponen	286
II. Meningkatkan Infrastruktur.....	286
III. Menciptakan Situasi Kondusif	287
IV. Membangun Kebijakan Investasi yang Lebih Ramah.....	288
BAB 8 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	293
BIBILOGRAFI	297
EPILOG	301
INDEKS	303
KETERANGAN PENULIS.....	309

PROLOG

Implikasi luas akibat persaingan negara-negara yang merupakan kekuatan baru Asia, tidak bisa diabaikan begitu saja, atau dianggap sebagai hal sepele, oleh Indonesia. Karena, ia akan merubah hubungan baik antar-negara yang sudah lama terbangun, misalnya antara China sebagai raksasa ekonomi pendatang baru dengan Jepang yang sejak lama dalam beberapa dasawarsa telah menjadi investor asing utama di Indonesia, yang bersama-sama dengan Taiwan dan Korea Selatan, juga telah menjadi negara-negara industri baru (*Newly Industrialized Countries* –NICs) di Asia. Ini belum memperhitungkan implikasi dan komplikasinya lebih luas dalam hubungan Indonesia dengan kekuatan baru Asia lainnya, seperti India.

Beberapa pertanyaan muncul dalam buku ini, yakni: bagaimana persaingan kepentingan China dan Jepang di kawasan, terutama di Indonesia, dan implikasinya terhadap kepentingan Indonesia? Bagaimana pula kepentingan keamanan Jepang di kawasan dan implikasi serta respons Indonesia terhadapnya? Apakah Indonesia akan melihat kehadiran militer Jepang sebagai sebuah ancaman? Lalu, hubungan seperti apa yang harus dikembangkan Indonesia dengan Jepang dalam konteks keamanan kawasan?

Juga dipertanyakan dalam buku ini, bagaimana kerjasama India-Jepang di bidang maritim dan implikasinya terhadap kepentingan maritim Indonesia? Bagaimana India dan Jepang menempatkan Indonesia dalam kerangka kebijakan maritimnya, serta apa yang perlu dilakukan Indonesia untuk menjaga

kepentingan maritimnya di tengah peningkatan kerjasama bidang maritim antara India dan Jepang? Selanjutnya, perlu dipertanyakan bagaimana respons Indonesia menghadapi peningkatan investasi Jepang ke Indonesia, dan sebaliknya, bagaimana Jepang melihat Indonesia sebagai negara tujuan investasi? Apa strategi yang dipersiapkan Indonesia dalam menghadapi arus investasi yang datang dari negeri sakura tersebut? Apa upaya yang dilakukan Indonesia-Jepang dalam kerjasama yang dilakukan kedua negara untuk meningkatkan hubungan bilateral mereka secara lebih luas?

Penelitian mengenai sikap Indonesia di tengah-tengah kebangkitan China, Jepang dan India dibutuhkan untuk memetakan permasalahan dan konflik kepentingan yang muncul dalam hubungan di antara negara-negara itu, beserta implikasinya di kawasan. Mengingat perkembangan kawasan Asia Tenggara kian dinamis dengan munculnya ketiga negara adidaya tersebut, penelitian ini juga bertujuan melakukan penilaian sejak dini mengenai bagaimana seharusnya hubungan Indonesia dengan ketiga negara adidaya baru itu dikembangkan. Dengan demikian, konflik yang dapat berdampak negatif pada perkembangan ekonomi, politik, dan keamanan di kawasan dikelola dengan bijak, sehingga upaya menciptakan kawasan Asia Tenggara yang stabilitasnya terjaga dapat terus diciptakan. Kemudian, kawasan ini dapat menjadi penggerak yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan-kawasan lain, dari cengkeraman krisis ekonomi global selama ini. Jadi, nantinya, Indonesia, China, India, dan Jepang, dapat diharapkan kehadiran dan perannya sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian global.

Penulisan buku ini tentu saja berguna bagi para anggota parlemen. Dengan kata lain, ia dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para anggota DPR RI untuk membantu mereka dalam menjalankan fungsi representasi, baik di bidang legislasi,

anggaran, maupun pengawasan. Jadi, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh Komisi-komisi terkait, seperti Komisi I yang berhubungan dengan masalah luar negeri dan keamanan, namun juga oleh komisi-komisi perhubungan dan infrastruktur, serta ekonomi, industri, dan anggaran, termasuk yang menangani masalah (BUMN) dan akuntabilitas keuangan negara.

Bagian Kesatu

**RIVALITAS CHINA, JEPANG, DAN INDIA DI
KAWASAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEPENTINGAN INDONESIA¹**

Oleh: Poltak Partogi Nainggolan

¹ Disusun dari hasil penelitian lengkap tahun 2016; penelitian awal dipublikasikan dalam *Analisis CSIS*, Kuartal Kedua 2016, Vol. 45, No.2.

I. Beragam peluang pada banyak komponen

Tantangan pertama bagi Indonesia maupun Jepang adalah bagaimana mempertemukan berbagai peluang untuk memperkuat jalinan di antara lembaga riset, pelaku usaha, dan masyarakat demi membawa keuntungan bagi kedua negara. Jika hal ini tidak dilakukan, negara lain dapat berlomba untuk berinvestasi. Langkah tersebut tentunya berakibat positif bagi Indonesia, tapi kemungkinan tidak dengan Jepang yang dapat menilai jika persaingan terus tumbuh di Indonesia artinya Indonesia harus menentukan sikap, siapa yang akan dipilih. Sementara, Indonesia saat ini sedang memasuki tahapan pembangunan yang tidak lagi mengandalkan pada bahan mentah dan buruh murah. Indonesia memasuki tahap pembangunan yang harus lebih bertumpu pada pengetahuan, inovasi, serta kreativitas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Pada tahap ini banyak tantangan yang harus diatasi. Salah satu cara mengatasi berbagai tantangan itu adalah dengan melakukan kerjasama produktif dengan negara-negara yang lebih maju di bidang teknologi. Sementara negara-negara yang lebih maju dapat memperoleh manfaat dari kerjasama penelitian terkait langsung dengan potensi perluasan perdagangan dan investasi di Indonesia.

II. Meningkatkan infrastruktur

Salah satu tantangan yang dihadapi untuk menarik investor asing guna penanaman modal adalah belum meratanya ketersediaan infrastruktur sebagai dasar penunjang investasi. Hal ini pun terjadi di antara antar-Kabupaten/Kota di wilayah provinsi.³ Pemerintah Indonesia perlu memacu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan pembangunan infrastruktur akan semakin meningkat seiring dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi. Kebutuhan

³ Wawancara dengan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, SE., MM, di Mentawai Sumatera Barat, 21 April 2016.

akan infrastruktur semakin kuat dan dapat mencapai dua hingga tiga kali lipat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

Untuk Indonesia sendiri, peningkatan infrastruktur menjadi komponen utama dalam upaya pemerintah untuk menarik investasi yang lebih besar guna meningkatkan ekonomi dan daya saing. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas penting yang terus dilakukan. Namun tidak akan mudah mengingat berbagai tantangan serta hambatan yang harus dihadapi mulai dari masalah pendanaan hingga persoalan teknis yang ada di lapangan. Dari sisi pendanaan, sebagai contoh, alokasi infrastruktur dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai masih dibawah standar yang diharapkan. Sedangkan kemampuan APBN semakin terbatas oleh beban subsidi yang sangat besar dan penjatahan APBN melalui undang-undang sektoral. Walaupun demikian, masih ada harapan akan peningkatan pembangunan infrastruktur. Upaya tersebut harus diimplementasikan dengan tata kelola yang baik melalui penerapan *good governance*. Apabila tata kelola pemerintah berlangsung baik, maka pemerintah tidak akan kesulitan dalam mengelola pendanaan, sehingga tidak rawan terjadinya korupsi. Dengan adanya *good governance* pada pembangunan infrastruktur, hambatan pendanaan tidaklah menjadi permasalahan.

III. Menciptakan situasi kondusif

Situasi yang kondusif adalah kunci dan modal dasar dalam menggaet investor agar menanamkan modalnya di Indonesia.⁴ Pemilu 2014 yang berlangsung secara damai dan kondusif di Indonesia dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk mau berinvestasi karena hal tersebut merupakan faktor

⁴ Linda Low, *ASEAN Economic Cooperation and Challenges*, Singapore: ISEAS Publications, 2004: 55.

penting yang harus dipenuhi dalam menciptakan iklim investasi yang baik. Indonesia perlu menjaga diri agar tetap kondusif untuk investasi. Terjaganya keamanan menjadi hal penting mengingat apa yang ingin dicita-citakan sebagai investor kembali kepada memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut tidak dapat tercapai tanpa adanya kerja keras semua pihak. Situasi kondusif yang diciptakan seluruh komponen masyarakat akan berbuah pada pesatnya pembangunan dan pertumbuhan investasi.

Pemerintah hendaknya senantiasa gencar dan gigih menghimbau seluruh komponen masyarakat agar menjaga keamanan secara stabil. Ditambah lagi situasi politik yang kondusif memang menjadi salah satu faktor penting untuk menarik investasi di dalam negeri karena para investor membutuhkan keamanan dan kepastian usaha di dalam negeri. Selain pada kondisi politik, transparansi, akuntabilitas serta *good governance* menjadi pertimbangan bagi negara investor untuk menarik mereka berinvestasi. Situasi yang sedemikian rupa juga mendukung investor Jepang untuk tetap berkeinginan investasi di sektor lainnya yaitu pelabuhan, walaupun China telah memenangkan proyek kereta cepat Bandung yang akan berlangsung.

IV. Membangun kebijakan investasi yang lebih ramah

Semenjak Jokowi terpilih menjadi Presiden Indonesia tahun 2014, rakyat memiliki harapan yang besar. Pemerintahan yang baru diharuskan agar dapat menjaga dan membuat iklim investasi di tanah air menjadi lebih baik. Iklim investasi tidak hanya meliputi sektor keamanan saja namun juga dalam hal memberikan kemudahan izin usaha. Pemberian izin usaha juga harus dibenahi agar tidak terlalu berbelit dan juga dapat memberikan kemudahan berinvestasi di dalam negeri melalui sistem satu pintu sehingga dapat mempercepat proses perizinan usaha. Terutama, untuk investasi sektor infrastruktur karena pada saat

ini Indonesia memerlukan investasi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi pasar global. Kebijakan pemerintah yang bersifat restriktif dapat menyebabkan terjadinya penurunan perkembangan persetujuan penanaman modal asing.⁵ Hal ini seharusnya dapat diminimalisir, sehingga kepercayaan para investor juga menjadi semakin bertambah.

Saat ini masih terdapat beragam peraturan pemerintah yang bertentangan. Sebagai contoh adanya perundang-undangan yang sudah lama No. 25 Tahun 2007 tetapi terhambat oleh perizinan, selain itu tidak ekuivalen dengan kementerian. Koordinasi belum tertata rapi. Sebagai contoh ada investor yang ingin membuka toko *dutyfree* di bandara yang sudah mengantongi izin dari BKPM. Tetapi toko tidak bisa dibuka karena tidak adanya izin yang melalui Kemenkeu dan Kemendag. Oleh karenanya, dalam diplomasi ekonomi yang sekarang dijalankan, hendaknya memperbaiki dulu perizinan-perizinan yang sudah ada. Selain pada tumpang tindihnya peraturan, keberadaan BKPM yang belum merata dirasakan perlu sehingga kantor BKPM yang belum tersedia perlu dikaji ulang. Dengan adanya BKPM serta Kantor Perizinan Satu Pintu yang tersedia di kabupaten atau kota dapat menjadikan kemudahan bagi kepengurusan investasi.

Agar Indonesia tetap menjadi tujuan utama negara di dunia, harus dibarengi dengan kebijakan yang ramah investasi. Jepang agak sulit menyesuaikan dengan kebijakan tender yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sehingga China cenderung menang. Hal ini disebabkan cara kerja secara matang dan terencana yang dilakukan Jepang. Sedangkan China berbeda dimana bekerja dengan tidak memerlukan waktu lama. Jepang selalu merencanakan matang-matang sebelum berinvestasi,

⁵ Suparji, *Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia, 2110: 25.

misalnya dalam infrastruktur bahkan dalam waktu 30 tahun sekaligus. Tetapi jika hanya dalam waktu satu hingga dua bulan, waktu tersebut tidak cukup sehingga Jepang cenderung tidak melaksanakan *tender*.⁶ Alhasil ini pula yang menjadi tantangan bagi kedua Negara dalam berdiplomasi untuk kerjasama ekonomi.

Kembali pulihnya situasi politik dan prospek ekonomi dalam negeri membuat investasi asing ke dalam negeri kembali bergeliat. Serangkaian kunjungan kenegaraan dan pertemuan bilateral umumnya membahas isu-isu yang terkait dengan perdangan dan investasi. Tidak jarang jika presiden Indonesia berkunjung ke negara investor untuk berusaha meyakinkan para pengusaha luar negeri untuk mau menanamkan modal di tanah air. Puncak pada kunjungan kenegaraan adalah dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman antar-negara. Dari sinilah akan tampak keberhasilan presiden Indonesia dapat meyakinkan para investor atau pengusaha luar negeri untuk berinvestasi ke Indonesia. Kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia baik yang bersifat bilateral, regional maupun internasional tentunya akan memberi dampak bagi perekonomian Indonesia. Dampaknya antara lain meningkatkan keuangan negara, meningkatkan daya saing ekonomi, menambah devisa negara, serta meningkatkan investasi.

Pemerintah mempunyai target-target investasi dari sektor makro ekonomi, namun sayangnya target investasi asing sering meleset. Untuk meminimalisir hal tersebut, kerjasama antar Kementerian terkait seperti Kemlu untuk berpromosi atau menarik investor telah dilaksanakan dan berjalan sangat bagus. Kegiatan ini dapat terus dilakukan dan ditingkatkan melalui *Trade Tourist Investment* (TTI). Dalam berpromosi tentunya harus ada *input*

⁶ Wawancara dengan Takonai Susumu, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, di Jakarta, 11 Maret 2016.

dan *output* yang seimbang. Hal ini tidak hanya dilakukan BKPM, namun juga Kementerian seperti Pariwisata serta Pekerjaan Umum, Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri selalu memberi sambutan bagus untuk menarik investor melalui promosi dan pameran. Namun yang terpenting dari upaya tersebut adalah pada saat investor datang ke daerah yang memang sudah siap, daerah tersebut mampu menarik serta memperlihatkan apa yang akan diinvestasikan.⁷ Investor semakin kritis untuk mencari tahu akan perlindungan, hak tanah serta harga yang didapat dengan berinvestasi. Kesenambungan antara pemasaran, promosi dan kesiapan daerah investasi haruslah menjadi perhatian pemerintah sehingga nantinya target investasi dapat terus tercapai

⁷ Wawancara dengan Bapak Zaenal Abidin, Sekretaris Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat, 19 April 2016.

BAB 8

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Walau sejarah mencatat penjajahan Jepang di Indonesia, kedua Negara terus menjalin kerjasama bilateral hingga saat ini. Bahkan Jepang merupakan salah satu dari tiga Negara investor terbesar ke Indonesia. Kerjasama yang terjalin juga merupakan efek dari instruksi Presiden dalam memberikan pengarahan kepada para diplomat agar meningkatkan diplomasi ekonomi dengan berupaya meningkatkan hubungan ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Investasi menjadi salah satu hubungan yang dimaksud selain meliputi hubungan perdagangan dan kerjasama keuangan. Investasi yang diutamakan adalah masuknya investasi asing masuk ke Indonesia. Instruksi yang diberikan presiden sebenarnya bukanlah hal baru bagi para diplomat Indonesia di luar negeri mengingat keberadaan mereka adalah menjalin serta menjaga hubungan Indonesia dan luar negeri. Sehingga, pekerjaan para diplomat sebenarnya dalam menarik investor asing seharusnya tidaklah membutuhkan proses rumit dan lama namun tentunya didukung penguasaan ilmu dan kerjasama berbagai pihak di dalam negeri. Dengan langkah tersebut, upaya diplomasi melalui perundingan, negosiasi menjadi layak diperlukan dalam hubungan antar-negara.

Telah banyak kesepakatan kerjasama yang ditandatangani antara Indonesia dan Jepang. Hal ini berarti Indonesia betul-betul sangat serius untuk meningkatkan kerjasama di bidang investasi. Beragam upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan investasi asing ke Indonesia dengan berdasar pada diplomasi ekonomi

tersebut. Pada perkembangannya, peran diplomasi ekonomi juga menjadi semakin luas, dimana hal ini menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan *power* suatu negara serta posisinya dalam skala internasional. Melalui diplomasi ekonomi, negara dan pelaku ekonomi dapat memperluas jaringannya dengan mitra dagang atau negara lain secara damai yang diharapkan dapat mencapai *win-win solution*. Indonesia dan Jepang memiliki berbagai prestasi kerjasama yang dapat dibanggakan, termasuk juga berbagai tantangan baru yang harus dihadapi bersama. Selama ini Jepang telah memberikan teknologi dan investasi besar yang diperlukan oleh Indonesia untuk membangun perekonomian Indonesia dan membuka lapangan kerja. Beragam tantangan dan upaya yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia hendaknya menjadi modal yang perlu dikembangkan sehingga investasi yang datang nantinya tidak hanya bertambah dari Jepang namun juga Negara-negara dunia lainnya.

Peningkatan kerjasama melalui pertemuan luar negeri perlu terus dilakukan. Komunikasi juga perlu dilakukan untuk bisa mengimplementasikan dari semua yang telah disepakati. Apabila komunikasi terus dilakukan secara intensif baik melalui pertemuan maupun forum investasi, hubungan luar negeri dalam investasi akan semakin baik dan semakin meningkat. Selain itu, diperlukan sinergi yang dapat dilakukan antara kebijakan dan perilaku pemerintah di dalam negeri melalui kegiatan kerjasama bilateral yang dilaksanakan diplomat Indonesia di luar negeri. Investor hendaknya tidak dipersulit dengan peraturan-peraturan yang dapat menyebabkan keengganan untuk berinvestasi. Kualitas SDM juga harus ditingkatkan dengan memberikan pelatihan-pelatihan tentang industrialisasi yang dapat diberikan secara berkala mengingat ilmu dan pengetahuan yang semakin berkembang seiring peningkatan teknologi. Peningkatan

kerjasama antar-negara hendaknya dapat dilakukan juga pada tingkat parlemen sehingga mampu mendukung pencapaian kerjasama dalam berbagai bidang terutama bidang perekonomian dan investasi.

BIBLIOGRAFI

Buku

- Banyu, Anak A. dan Yayan M. Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Baranay, Pavol. *Modern Economic Diplomacy*. Latvia: Publications of Diplomatic Economic Club, 2009.
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. *Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah Revisi Tahun 2006*. Jakarta.
- Harry Johnson dikutip dalam Thee Kian Wie, "Understanding Indonesia: The Role of Economic Nationalism," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Vol. 3, 2010.
- Holsty, K.J., *International Politics, A Framework for Analysis*, 4th ed., London: Prentice Hall, 1983.
- Low, Linda. *Asean Economic Co-operation and Challenges*, Singapore: ISEAS Publications, 2004.
- Mubyarto. "Reformasi Ekonomi Menuju Sistem Ekonomi Kerakyatan," dalam Selo Soemardjan (ed.), *Menuju Tata Indonesia Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Rana, S.K., *Economic Diplomacy: The Experience of Developing States*, dalam (ed), *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations*. Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock. Hampshire: Ashgate Publishing, 2007.

Stiglitz, Joseph. *Globalization and Its Discontents*. London: Penguin Book, 2002

Suparji. *Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia*. Universitas Al Azhar Indonesia. Jakarta, 2010.

Surat Kabar

“BKPM Gandeng Diplomat Gaet Investasi Asing,” *Harian Tempo*, 3 Februari 2015.

“Investor Asing Ramai-ramai Perbesar Bisnis di Indonesia,” *Harian Kompas*, 13 April 2015.

“Jokowi Undang Investor Asing Tanam Investasi di Indonesia,” *Harian Republika*, 4 November 2014.

“Kereta Cepat: Kekuatan Lobi Dua Negara,” *Harian Kompas*, 12 Agustus 2015.

Pedoman Umum Upaya Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi, BPPK, 2015.

Sukma, Rizal “*Soft Power* Tidak Akan Berarti Jika Tidak Diimbangi Dengan *Hard Power*,” Tabloid Diplomasi September 2008.

“Rupiah Bisa Tembus Rp14.000 Per Dollar AS, Jika Jokowi Memaksa,” *Harian Kompas*, 11 Desember 2014.

Internet:

Alexander L. Vuving, “How Sft Power Works”, 2009, <http://www.apcss.org/Publications/Vuving%20How%20soft%20power%20works%20APSA%202009.pdf>, hal.13, diakses 10 Agustus 2016.

“Arus Investasi 2015: Masalah Politik Masih Jadi Risiko”, <http://finansial.bisnis.com/read/20150218/9/404118/arus-investasi-2015-masalah-politik-masih-jadi-risiko->, diakses 30 Juli 2016.

- “Begini Cara Pemerintahan Jokowi Ciptakan Iklim Investasi “Pro Investor”, <http://bisniskeuang-an.kompas.com/read/2015/05/20/224600026/Begini.Cara.Pemerintahan.Jokowi.Ciptakan.Iklim.Investasi.Pro.Investor>, diakses 16 Agustus 2016.
- “Diplomasi Ekonomi dan Investasi Asing”, <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/02/17/147444/diplomasi-ekonomi-dan-investasi-asing/#.Vdnk5Pmqkko>, diakses 1 Agustus 2016.
- “Diplomasi Topang Kemandirian Ekonomi Sosial”, www.antaranews.com/berita/461444/diplo-masi-topang-kemandirian-ekonomi-sosial/, diakses 2 Agustus 2016.
- “Investasi Asing Dipuji Dunia, BKPM Janjikan Kemudahan Usaha”, www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150706101539-92-64559/investasi-asing-dipuji-dunia-bkpm-janjikan-kemudahan-usaha/, diakses 4 Agustus 2016.
- “Investasi Jepang Berikan Nilai Tambah bagi Ekonomi”, <http://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita-investasi/investasi-jepang-berikan-nilai-tambah-bagi-ekonomi>, diakses 10 September 2016.
- Joseph S, Nye, Jr, 2008. “Public Diplomacy and Soft Power”, Sage Publications, Inc. <http://www.jstor.org/stable/25097996>, diakses 8 Agustus 2016.
- “Kawasan Industri Terkendala Minimnya Investasi”, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/59-73/Kawasan-Industri-Terkendala-Minimnya-Investasi>, diakses 10 Agustus 2016.

Ranny Virginia Utami, “Menlu Baru Indonesia Terapkan Diplomasi Pro Rakyat”, Posted 29 August 2014, <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141029153858-127-8734/menlu-baru-ri-terapkan-diplomasi-pro-rakyat/>, diakses 3 Agustus 2016.

“Sistem Bantuan ODA Jepang di Indonesia,” http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatiso-da_01.htm, diakses 10 September 2016.

“Tantangan Ekonomi dan Promosi Jokowi di Luar Negeri”, <http://www.dw.com/id/tantangan-ekonomi-dan-promosi-jokowi-di-luar-negeri/a-18040382>, diakses 8 Agustus 2016.

Informan:

1. Brigjen TNI Jan Pieter Ate, M.Bus., MA., Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan, di Jakarta tanggal 14 Maret 2016
2. Rene Pattiradjawane, Wartawan Senior Kompas. 15 Maret 2016
3. Takonai Susumu, Diplomat Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, di Jakarta, 11 Maret 2016.
4. Zaenal Abidin, Sekretaris Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat, 19 April 2016.
5. Ir. Afriadi Laudin, M.Si, Bappeda Sumatera Barat, di Padang tanggal 19 April 2016.
6. Bupati Mentawai Bapak Yudas Sabaggalet, SE., MM., di Mentawai Sumatera Barat, 21 April 2016.

EPILOG

Di tengah-tengah rivalitas kekuatan yang meningkat di antara *major powers* China, Jepang dan India, untuk bisa menjadi salah satu kekuatan utama baru di kawasan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Indonesia. Ia, pertamanya, harus mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6-7 persen setahun untuk mengembangkan *human capital* agar dapat meraih bonus demografi dan memberi alokasi yang jauh lebih besar untuk anggaran belanja pertahanan atau kekuatan militernya. Kemudian, ia juga harus mampu mewujudkan konsolidasi demokratisnya, sehingga Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang menjadi mssuh utamanya di dalam negeri, dapat dieliminasi secara efektif. Dengan demikian, segala sumber daya yang ada, alam dan manusia, dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan nasional --mendukung munculnya Indonesia sebagai kekuatan baru di kawasan.

Perubahan lingkungan strategis di kawasan yang dramatis di tengah-tengah keterbatasan kemampuan Indonesia dalam menyikapinya, tentu saja membutuhkan respons yang cerdas. Sebagai solusi alternatif, negeri ini perlu menilai kembali doktrin politik luar negeri bebas dan aktif yang telah digunakan sebagai landasan kebijakannya selama lebih dari 7 dasawarsa, sejak ia merdeka tahun 1945. Doktrin yang dibuat usai Perang Dunia (PD) II, dengan struktur atau konstelasi kekuatan global yang ditandai dengan munculnya dua negara adikuasa baru pemenang PD II, yakni AS dan Uni Soviet, yang tidak lama kemudian berubah dari sekutu menjadi seteru, setelah memasuki periode Perang Dingin, yang ditandai dengan kontestasi baru kekuatan.

Doktrin politik luar negeri bebas dan aktif yang dibuat dalam kondisi munculnya dua poros kekuatan dunia sudah tidak relevan lagi digunakan, mengingat dunia kini sudah polisentris, tidak lagi dimonopoli oleh kekuatan adidaya AS, tetapi juga dengan kehadiran China, Jepang, dan India sebagai *major powers* di kawasan. Sementara, Indonesia sendiri telah diperhitungkan akan muncul sebagai salah satu kekuatan baru di kawasan, dengan potensi pertumbuhan ekonominya dalam sampai tahun 2050. Sehingga, dalam tiga dasawarsa ke depan, tidak hanya ada ketiga negara yang disebutkan di atas, namun juga Indonesia dan Korea Selatan dan Australia, dalam jajaran *major powers*, sebagai bagian dari G-20.

Adapun keseimbangan dinamis (*dynamic equilibrium*) yang diluncurkan Menlu Marty Natalegawa adalah konsep sekaligus doktrin alternatif yang realistis, pengganti mendayung di antara dua karang. Doktrin ini tampak merefleksikan adanya kepentingan pragmatis Indonesia yang harus diadaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis yang sedang berjalan. Jadi tampak ada bedanya dengan doktrin semula yang bersandar pada paradigma politik bebas dan aktif. Di masa Menlu Natalegawa, dengan doktrin baru yang ia perkenalkan, Indonesia mendukung terwujudnya Pakta Indo-Pasifik (*Indo-Pacific Treaty*), dengan posisi Kepulauan Indonesia yang berada dalam 1 rim, di antara 2 Samudra, yakni Hinda dan Pasifik, yang sejalan dengan kepentingan India dan AS. Pakta ini merupakan respons Indonesia atas perubahan lingkungan strategis yang telah terjadi dewasa ini, di tengah-tengah terjadinya defisit kepercayaan atas ASEAN dan ancaman sengketa teritorial yang meningkat di antara negara anggotanya.

INDEKS

A

abad 4, 11, 22, 24, 65, 67, 101,
135, 140, 212, 215, 227,
239
ADB 109, 110, 177
AIIB 109, 110
Akitaka Saiki 34
aliansi pertahanan 47, 55
ancaman keamanan laut 28
Angola 130
ARF 237
ASEAN 19, 24, 25, 26, 30, 33, 71,
72, 77, 78, 80, 97, 99, 110,
118, 135, 148, 149, 157,
159, 162, 170, 181, 235,
237, 238, 252, 259, 260,
277, 287, 302, 310
Ashton Carter 54
Asia 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 20,
22, 23, 24, 25, 26, 30, 31,
32, 35, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 57, 60,
62, 70, 80, 81, 84, 90, 107,
116, 131, 144, 147, 149,
152, 156, 162, 166, 168,
169, 170, 173, 174, 179,
181, 187, 188, 190, 191,
195, 197, 200, 203, 204,
206, 208, 217, 218, 219,
221, 222, 223, 226, 227,
228, 229, 230, 231, 234,
235, 236, 237, 238, 243,

244, 245, 251, 257, 259,
267, 274, 280, 285
Asia Pasifik 15, 20, 22, 35, 46, 84,
187, 200, 203, 204, 206,
208, 228
Asia Tenggara 3, 4, 8, 22, 23, 24,
25, 26, 32, 47, 48, 60, 62,
80, 90, 107, 131, 149, 152,
162, 166, 173, 174, 237,
238, 259, 285
Asia Timur 5, 22, 23, 31, 32, 35,
187, 188, 190, 191, 197,
200, 218, 219, 221, 223,
226, 227, 228, 229, 230,
231, 235, 236, 245
Asia Timur Raya 5, 22

B

balance of power 13, 189, 190,
230
Ballistic Missile Defense 205
bargaining position 72
basic defense capability 201
bebas aktif 255, 263
Beizing 28, 36, 41, 48, 51, 52, 54,
67, 86, 93, 125, 165, 168,
177, 187, 260
BKSAP 144, 166
Blok Masela 60, 87, 88, 89, 90, 91,
161, 168, 173
BUMN 7, 84, 85, 86, 93, 99, 101,
104, 112, 132, 177
burden sharing 206, 229

C

CCCG 116
CCPIT 103
Cheng Ho
Cheng Yonghua 34
CHI 116, 117
Coast Guard 67, 123, 125, 127,
128, 130, 152, 220
Colin Willett 35
concentric circle 77
cornerstone 77, 148
CSCEC 104
CSIS 1, 98, 130, 165, 229, 230,
243

D

Deng Xiaoping 9, 11
destroyer 236
Detailed Engineering Design 119
détente 28, 199
deterrence 13, 71, 158
Diaoyu 33, 34, 35, 40, 219, 220,
221, 231, 233, 234
Diet 81, 185, 186, 205, 213, 246
Dinasti Ming 10, 11, 67, 127, 129
diplomasi besi 81
DPJ 211
DTW 141
dwelling time 82
Dynamic Defense Force 207
dynamic equilibrium 149, 152,
154, 302

E

East Asia Summit 31
East Look Policy 150
e-commerce 80, 117
Eriko Nakano 26

F

F-35 39
FDI 20, 108, 109, 259
Fiery Cross 66
first thing first 77
Freeport 100
Fumio Kishida 42, 131

G

G-20 18, 37, 79, 136, 145, 173,
277, 302
gao-tie wajiao 81
GNB 43, 44, 45, 162
Groatian 14
Guidelines 1978 204, 205
gun boat diplomacy 67, 124, 129,
131
GVK 137

H

H-6 29, 221
hak sejarah 29
Hans Morgenthau 14
hard power 70, 101, 266
Hindu 5
Honshu 40
HTI 121
Hua Chunying 125
human capital 97, 151, 301
humanitarian intervention 54
Hutan Tanaman Industri 121

I

ICT 143
illegal fishing 95, 105, 123, 124,
131, 152, 161

- IMO 131
 IMTA 74, 86
 Inpex Corporation 88, 89
international fleet review 154, 157
inward looking 150, 162
 IONS 155
 IORA 21, 45, 59, 60, 61, 139, 155, 157, 174
 Ise Shima 119
 ITLOS 129
 ITPC 114
 IUU 124, 125, 126, 174
- J**
- Jalur Sutera 10, 23, 24, 67, 80
 Japan's Defense Agency 195, 206, 207
 Japan Self Defense Force 32
 JCP 211
 JICA 81, 99
 JIP 211
Joint Declaration 204, 205, 248
 Joko Widodo 3, 4, 7, 78, 79, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 94, 99, 102, 119, 131, 132, 134, 138, 152, 158, 255
 JSDF 25, 32
 JS Yuudachi 236
 JS Yuugiri 236
- K**
- KAA 44, 101, 144, 149, 162, 257
 KAC viii, 6, 7, 21, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 96, 101, 104, 106, 108, 110, 111, 133
 Kantian 14, 70
 Kawasan Ekonomi Khusus 62, 93, 138, 180
 KEK 93, 138, 173
 Kenneth Walz 14
 Kepulauan Indonesia 5, 22, 60, 149, 156, 302
 KKN 151, 301
 KKP 31, 67, 123, 124, 126, 130, 131, 132, 179
 KLHK 120, 121
 Komodo 2016 152, 153, 154, 155, 173
 Konstitusi 1947 186, 187, 193, 208, 212, 227, 239
 Koran Tempo 19, 41, 68, 87, 88, 110, 112, 114, 116, 119, 126, 139, 167, 169, 170, 171, 172, 175, 177, 178, 274
 Kozo Honsei 26
 KSAL 153, 154
 Kway Fey 123, 127, 131, 134
- L**
- Lantamal 100, 102, 153, 155, 180, 237, 238, 269
 latihan perang 27, 28, 37, 56
 Laut China Selatan iii, 8, 26, 171, 172, 187, 219, 221, 222, 230, 231, 232, 238, 239
 Laut China Timur 8, 25, 30, 31, 33, 36, 187, 189, 219, 220, 221, 222, 230, 231, 233, 239, 241
 Laut Tiongkok 34, 132
 LDP 185, 186, 198, 211, 214, 245
 Lenin 9, 10, 65, 166

Leninisme 9

Lion Air 141

LNG 87, 88, 89

M

Machiavellian 14

Majapahit 4, 5, 11, 22, 129

Manado 77, 93, 94, 96, 98, 99,
100, 102, 140, 141, 169,
179, 180, 181, 182, 238,
269, 270

Manohar Parrikar 46, 54, 56

Maoisme 9

Mao Zedong 44

maritime axis 78

maritime peacekeeping operations
153

Marty Natalegawa 149, 302

MEF 69, 70, 146, 152

Minimum Essential Forces 146

misil 32

missile defense system 32

MNEK 236

MRT 96

Mutual Security Treaty 194, 197

N

Nakatani 37

Narendra Modi 46, 54

National Defense Agency 195

National Police Reserve 195, 247

Natuna 68, 123, 124, 125, 127,
128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 151, 161, 174,
178, 179

NDPG 205, 207, 208

Negeri Sakura 100

Newly Industrialized Countries 8

Nuklir 55, 174

Nusantara 5, 11, 135, 139, 172

O

off-shore 88

offshore banking 66

Okinawa 30, 33, 41

OLNG 88

One Belt One Road 24, 67

one belt security 24

on-shore 88, 89, 90, 91

open door policy 72

operasi kemanusiaan 54

Orde Baru 21, 23, 83, 84, 98, 102,
134

Oyashio 27

P

Pangkalan Misawa 39

paper tiger 147

Paracels 66

Partai Komunis China 9

Pasal 9 186, 187, 193, 212, 213,
214

Pasukan Bela Diri 33, 195, 199,
212

Patimban 111, 119, 120, 167, 177

Pax Sinica 67

PBB 38, 42, 55, 126, 149, 194,
196, 202, 203, 208, 216,
217, 223

PDB 17, 18, 147, 259

PD II 10, 30, 48, 145, 301

perairan perbatasan 38

Perang Dingin 10, 27, 32, 43, 44,
45, 52, 61, 145, 194, 198,

- 199, 200, 201, 202, 204,
205, 206, 219, 227, 229,
301
- Perang Dunia I 13
- Perang Dunia II 37, 185, 186, 187,
193, 194, 208, 212, 215,
217, 218, 227, 230, 232,
239, 240
- PFG 211
- PHK 73, 76, 106, 175
- PKC 9, 11, 102, 132
- PLN 91, 113
- PLTA 90, 91
- PLTGU 90, 91
- PLTU 90, 113
- PLTUB 74
- PMA 72, 73, 74, 76, 80, 88, 89, 93,
94, 96, 97, 103, 115, 117,
139, 157
- PMK 142
- policy shifting* 32
- proactive diplomacy* 234
- Produk Domestik Bruto v, 17, 147
- proto maritime colonialism* 67
- pulau palsu 66
- R**
- Rachmat Gobel 82, 84, 134
- rebalancing* 32, 81
- Rene L. Pattiradjawane 10, 66, 68,
80, 81, 82, 124, 125, 126,
127, 146, 149, 182
- Retno Marsudi 26, 123
- Rini Soemarno 82, 84, 86, 101,
132, 133
- Rizal Ramli 87, 168
- rudal 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 56, 57, 158, 159,
201, 203, 205, 219, 223,
224, 225, 230, 232, 239
- Rusia 10, 27, 28, 29, 47, 51, 52,
56, 59, 176, 227, 228, 277
- Ryutaro Hashimoto 204
- S**
- Sam Pa 130, 176
- Samudra Hindia 15, 45, 47, 48,
49, 50, 53, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 153, 156,
157, 161, 221, 222, 229
- Samudra Pasifik iii, v, 15, 51, 53,
221, 229
- Satoru Mori 32, 33, 45, 179, 219
- Scarborough Shoal 29, 163
- SDA 4, 20, 21, 67, 80, 95, 120,
141, 161
- SDF 186, 195, 199, 202, 204, 207,
208, 209, 212, 214, 215,
216, 217, 221, 223, 226,
229, 230, 231, 233, 234,
239
- SDM 75, 97, 258, 276, 280, 294
- SDR 70
- Selat Malaka 23, 60, 61, 62, 238
- Selat Sunda 23
- Semenanjung Korea 162, 190,
201, 223, 225, 226, 232
- Senkaku 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39,
40, 172, 219, 220, 221, 231,
233, 234, 250
- Sesko 150
- Shangri-la Dialogue 235
- Shigeru Yoshida 194
- silent diplomacy* 133

Silk Road 67
si vis pacem para bellum 14
SLOC 221
SLOT 221
smelter 112, 169
Soeharto 3, 21, 23, 83, 98, 99,
134, 148, 151, 166
soft power 70, 101, 102, 103, 266,
267, 278
Sonangol 130
Song Tao 102, 132, 133
Sorong 96
sphere of influence 15
Spratly 29, 66
State Council 102
strategi pertahanan 36
SU-30 29, 35, 41
Subic Bay 27
Subi Reefs 66
Sumber Daya Alam v, 4, 20
Sungjibaegam 224
Surya Paloh 130, 176
Susi Pudjiastuti 123, 126, 132

T

Taisho 34
Takehiko Nakao 109
Tanizaki Yasuaki 96
Tanjung Priok 82, 120, 236
throat 222
tol laut 7, 99
Tomomi Inada 37, 42
TPP 22, 78
traditional fishing ground 124,
125

traditional fishing zone 132, 133
Trans Sulawesi 104, 169
two plus two 237

U

uji coba 32, 36, 37, 38, 41, 50,
112, 219, 223, 224, 225,
232, 239
UKM 21, 105
UNCLOS 123, 125, 128, 129, 131,
132, 133, 161, 177
Upper House 185, 186, 246
USGS 224

W

Wang Yi 42
WPNS 155, 236, 237

X

Xi Jinping 10, 11, 79

Y

Yen 39, 99
Yonaguni 33, 171
Yoshihide Suga 34
Yuki Tamura 30

Z

Zheng He 67, 129

KETERANGAN PENULIS

Poltak Partogi Nainggolan, MA, Dr. phil., Prof. adalah Peneliti Utama/IV-e dan Profesor Riset bidang Masalah-Masalah Hubungan Internasional di Pusat Penelitian-Badan Keahlian Dewan, Sekretariat Jenderal DPR RI. Pada tahun 1986 menyelesaikan studi S-1 di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Jurusan Hubungan Internasional, Program Studi Perbandingan Politik. Pada tahun 1999 menyelesaikan studi pasca-sarjana (S-2) di *Graduate School of Political Science and International Relations* di *The University of Birmingham*, Inggris, bidang *Security Studies*. Pada Pebruari tahun 2011 menuntaskan program doktoral ilmu politik di *Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg*, Jerman, dengan tesis *The Indonesian Military Response to Reform during Democratic Transition: A Comparative Analysis of Three Civilian Regimes 1998-2004*. Menulis buku antara lain *Reformasi Struktur Ekonomi RRC Era Deng Xiao-ping*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995; Co-penulis dan editor buku *Panduan Parlemen Indonesia*, Jakarta, Yayasan API, 2001; *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman terhadap Integritas Teritorial*, Jakarta: Tiga Putra Utama, 2004; serta buku-buku lain, di antaranya, yang terbaru *Indonesia dan Kemitraan Strategis dalam Hubungan Internasional*, Jakarta: Azza Grafika, 2013, *Keamanan Maritim di Kawasan*, Jakarta: Azza Grafika 2014, dan *Agenda Poros Maritim Dunia dan Respons dan Perubahan Lingkungan Strategis*, Jakarta: Azza Grafika, 2015. Dapat dihubungi di alamat email: pptogin@yahoo.com.

Simela Victor Muhamad, Drs, M.Si adalah Peneliti Madya bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Menyelesaikan pendidikan

Sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, pada 1986. Menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana (S2) Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia, pada 1999. Aktif sebagai peneliti bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan bertugas memberikan dukungan substansi yang terkait dengan masalah-masalah hubungan internasional kepada Anggota DPR RI baik untuk keperluan Rapat-rapat Kerja dengan Pemerintah maupun untuk Sidang-sidang Keparlemenan Internasional.

Sita Hidriyah, S.Pd.,M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang kepakaran Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Peningkatan Kerjasama Pembangunan Negara Indonesia dan Australia pada Penanggulangan Bencana” (2013), “Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia” (2014), dan “ASEAN dan TKI Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015” (2014).

Indonesia

ditengah-tengah Kebangkitan
China, Jepang dan India



Dewasa ini China, Jepang, dan India diakui sebagai kekuatan besar di Asia, yang dimaknai kehadiran dan perannya sebagai negara adidaya dalam ekonomi, politik, dan militer, yang diperhitungkan oleh negara-negara adidaya, seperti AS dan sekutu-sekutunya, yang sangat berpengaruh dalam menentukan masa depan dunia.

Implikasi luas akibat persaingan negara-negara yang merupakan kekuatan baru Asia, tidak bisa diabaikan begitu saja, atau oleh Indonesia karena hal ini akan merubah hubungan baik antar-negara yang sudah lama terbangun. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian sejak dini mengenai bagaimana seharusnya hubungan Indonesia dengan ketiga negara adidaya baru itu dikembangkan. Dengan demikian, konflik yang dapat berdampak negatif pada perkembangan ekonomi, politik, dan keamanan di kawasan dikelola dengan bijak, sehingga upaya menciptakan kawasan Asia Tenggara yang stabilitasnya terjaga dapat terus diciptakan. Sehingga nantinya, Indonesia, China, India, dan Jepang, dapat diharapkan kehadiran dan perannya sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian global.